

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PEMAHAMAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal)**

**TIKA SEPTININGTYAS**

**20140420343**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**INTISARI**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal.

**Kata kunci:** akuntabilitas, transparansi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan.

## **PENDAHULUAN**

Suatu organisasi pada umumnya memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keadaan keuangan yang terjadi pada organisasi tersebut selama satu periode pelaporan. Organisasi yang menyusun laporan keuangan bukan hanya organisasi yang bergerak di sektor privat saja, organisasi yang bergerak di sektor publik juga melakukan penyusunan laporan keuangan. Suatu sistem pemerintahan juga termasuk sebagai organisasi yang bergerak di sektor publik sehingga melakukan penyusunan laporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang belum pernah dilakukan penelitian dengan judul maupun variabel yang sama dengan penelitian ini. Selain itu jika kebanyakan penelitian terdahulu penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP dari BPK, maka penelitian ini justru memilih Kabupaten Kendal yang berkali-kali mendapat opini WDP dari BPK.

Salah satu Kabupaten yang mendapatkan opini tersebut yaitu Kabupaten Kendal. Bahkan Kabupaten Kendal telah mendapat opini WTP selama beberapa tahun berturut-turut dengan pengecualian yang hampir sama setiap tahunnya yaitu antara lain laporan barang milik daerah tidak mempunyai informasi aset tetap yang konsisten. Selain itu, tanah untuk jalan belum disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Permasalahan lain yaitu tanah yang digunakan untuk irigasi belum disajikan dan mutasi peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) juga tidak valid.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti kembali factor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti akuntabilitas, transparansi, pemahaman SAP, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dan penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswadi (2013) yaitu akuntabilitas dan transparansi, Nugraheni dan Subaweh (2008) yaitu pemahaman SAP, dan Widari (2017) tentang SPI.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Stewardship**

Teori *stewardship* dibangun dari psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer berperan sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama yang telah disepakati. Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara *steward* dan pemilik maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik adalah pertimbangan yang masuk akal karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

### **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas suatu kinerja atau program yang telah dilakukan. Dengan adanya akuntabilitas, maka proses pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntabilitas yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Maka akuntabilitas dijadikan prasyarat terwujudnya pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *good governance*.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban adalah suatu bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana pegawai pemerintah harus mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan

sebagai tugasnya. Akuntabilitas mempunyai hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran atau target kebijakan maupun program yang telah ditetapkan. Dengan adanya tanggung jawab terhadap pemerintah atas penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas, maka dapat menjadi fungsi *control* bagi pemerintah sehingga diharapkan timbulnya kepercayaan dari masyarakat.

Dengan demikian, maka prinsip akuntabilitas dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Bentuk pertanggungjawaban khususnya terhadap laporan keuangan daerah yang dapat dipercaya oleh masyarakat telah diwujudkan dengan baik.

### **3. Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan–kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sumarsono, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi ikut berperan penting di dalam proses pelaporan keuangan diduga dapat untuk meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### **4. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara. (Arep dan Tanjung, 2008)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## **5. Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian adalah suatu proses penetapan standar dengan menerima umpan balik atau *feedback* berupa kinerja yang telah terealisasi, dan mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu jika kinerja sesungguhnya berada secara signifikan dengan apa yang direncanakan sebelumnya (Siagian, 2013). Sistem pengendalian yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. *Total System*. Sistem pengendalian harus total sistem karena harus semua aspek dari operasi organisasi dan menjamin bahwa semua bagian dari operasi telah sesuai dengan yang direncanakan.
- b. *Goal Congruence*. Fungsi pengendalian adalah mendorong agar tindakan seseorang di dalam organisasi mencakup dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan individual dan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Kesesuaian antara *goal* individual manajer dengan *goal* organisasi secara keseluruhan disebut *goal congruence*.
- c. *Financial Framework*. Sistem pengendalian manajemen seharusnya dibangun sebagai suatu struktur finansial yang berarti estimasi dan ukuran disajikan dalam satuan moneter.
- d. Sistem pengendalian manajemen dilakukan secara *rytmatis*, berarti tahap demi tahap harus dilakukan secara berurutan dan benar.
- e. *Integrity*. Sistem pengendalian harusnya menjadi sistem yang terkoordinasi dan terintegrasi (Siagian, 2013)

## **6. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sebuah laporan keuangan dapat dikatakan baik jika informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut mudah dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam proses pengambilan keputusan, bebas dari informasi yang menyimpang, kesalahan yang bersifat material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya. Berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas menurut PP No. 71 tahun 2010:

### **a. Relevan**

Laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dibuat dengan tepat waktu. Selain itu, informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta mempertegas atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

### **b. Andal**

Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan terhindar dari kesalahan yang material, bersifat netral dan menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi.

### **c. Dapat dibandingkan**

Informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan milik entitas lain yang sejenis.

### **d. Dapat dipahami**

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk maupun istilah yang telah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna agar pengguna dapat mempelajari informasi yang dimaksud secara mudah.

## **KERANGKA PENELITIAN**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu akuntabilitas, transparansi, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

## **HIPOTESIS**

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

H3: Pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

H4: SPI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal. Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Kendal adalah sebanyak 26 OPD yang terdiri dari 4 dinas tipe A, 13 dinas tipe B, 3 dinas tipe C, 3 badan, sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dan inspektorat.

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel dipilih atas kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing dinas pada OPD Kabupaten Kendal.
- 2) Pejabat dan aparat memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dalam satu periode pelaporan keuangan.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kuesioner penelitian ini nantinya akan diserahkan langsung kepada responden yang merupakan pejabat OPD Kabupaten Kendal. Kuesioner yang digunakan menggunakan skala likert.

## **VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Metode Analisis Data**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Pemahaman SAP (X3), dan SPI (X4), sedangkan variabel dependen adalah kualitas LKPD (Y). Pengukuran variabel menggunakan skala likert yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian. Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = netral, Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

### **2. Analisis Statistik Deskriptif**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan, yaitu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

#### **1) Uji Validitas**

Uji validitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner, validitas merupakan tingkat keandalan alat ukur yang digunakan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan kuesioner (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Sedangkan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kaiser Meyer Olkin Measure Of Sampling Adequacy* (KMO MSA) dengan syarat suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai  $KMO > 0,05$  dan memiliki nilai *factor loading*  $> 0,4$ .



## 2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pengukur kuesioner yang merupakan indikator dari tiap variabel. Kuesioner dapat dikatakan handal dan reliabel jika jawaban dari pertanyaan orang tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* dengan taraf signifikansi 5%. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Nazzarrudin dan Basuki, 2017).

## 3. Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda karena yang akan diuji dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Penggunaan metode analisis dalam regresi dalam pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji apakah model tersebut telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik adalah untuk memperoleh model regresi tidak bias yang terbaik. Tahapan pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas.

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai data yang berdistribusi normal atau tidak, dan juga merupakan asumsi bahwa setiap variabel berdistribusi normal, jika distribusi ini dilanggar maka menjadi tidak valid untuk sampel yang berjumlah kecil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* dengan koefisien *Asymp. Sig (2-tailed) > alpha* 0,05 yang berarti data tersebut berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem multikolinearitas. Uji multikolinearitas yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kesamaan antar variabel independen dalam suatu model. Suatu regresi dapat dikatakan bebas multikol jika mempunyai nilai  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$ .

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians untuk semua pengamatan atau terdapat pengaruh perubahan variabel bebas dengan nilai mutlak residual, sehingga penaksiran koefisien regresi menjadi tidak efektif dan hasil penafsiran kurang akurat. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser* dengan melakukan regresi pada nilai absolut residual dengan variabel bebas yang digunakan. Jika nilai  $Sig > \alpha 0,05$  maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

### **4. Pengujian Hipotesis**

Model persamaan regresi yang disusun pada penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

$\alpha$  = Konstanta

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

$\beta_1$ - $\beta_5$  = Koefisien Regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Pemahaman SAP

X4 = Sistem Pengendalian Internal

E = *Error*

Analisa regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian statistik yang dilakukan adalah:

**a. Uji *t***

Uji *t* merupakan pengujian variabel-variabel independen secara individu. Tujuan dilakukan uji tersebut yaitu untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika :

1. Sig < alpha 0,05
2. Koefisien regresi searah dengan hipotesis

**b. Uji F**

Pengujian nilai F merupakan suatu alat uji untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen yang diuji dengan signifikansi 0,05. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan Sig F dengan alpha 0,05. Jika Sig F < alpha 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Koefisien determinan ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam merangkai variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara satu dan nol. Nilai  $R^2$  yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel independen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian.

Variabel	N	Std. Deviation	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual		
			Min	Max	Mean	Min	Max	Mean
Akuntabilitas	34	2,097	6	30	18	19	30	24,71
Transparansi	34	2,635	8	40	24	26	38	31,71
Pemahaman SAP	34	2,097	5	25	15	20	25	21,24
Sistem Pengendalian Internal	34	1,701	6	30	18	19	28	24,32
LKPD	34	2,381	5	25	15	20	25	22,29

Berdasarkan hasil Tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas memiliki kisaran teoritis sebesar 6-30, kisaran aktual sebesar 19-30, nilai standar deviasi sebesar 2,097, nilai minimal sebesar 19 dan nilai maksimal sebesar 30. Jika dilihat dari nilai mean aktual yang dibandingkan dengan nilai kisaran aktual, variabel akuntabilitas memiliki nilai mean aktual sebesar 24,71 sehingga rata-rata akuntabilitas tinggi.

Sedangkan pada variabel transparansi, dapat disimpulkan bahwa memiliki kisaran teoritis sebesar 8-40, kisaran aktual sebesar 26-38, nilai standar deviasi sebesar 2,635, nilai minimal sebesar 26 dan nilai maksimal sebesar 38. Jika dilihat dari nilai mean aktual yang dibandingkan dengan nilai kisaran aktual, variabel transparansi memiliki nilai mean aktual sebesar 31,71 sehingga rata-rata transparansi rendah.

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman SAP memiliki kisaran teoritis sebesar 5-25, kisaran aktual sebesar 20-25, nilai standar deviasi sebesar 2,097, nilai minimal sebesar 20 dan nilai

maksimal sebesar 25. Jika dilihat dari nilai mean aktual yang dibandingkan dengan nilai kisaran aktual, variabel pemahaman SAP memiliki nilai mean aktual sebesar 21,24 sehingga rata-rata pemahaman SAP rendah.

Berdasarkan hasil Tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel SPI memiliki kisaran teoritis sebesar 6-30, kisaran aktual sebesar 19-28, nilai standar deviasi sebesar 1,701, nilai minimal sebesar 19 dan nilai maksimal sebesar 28. Jika dilihat dari nilai mean aktual yang dibandingkan dengan nilai kisaran aktual, variabel SPI memiliki nilai mean aktual sebesar 24,32 sehingga rata-rata SPI rendah.

Sedangkan pada variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan hasil Tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas LKPD memiliki kisaran teoritis sebesar 5-25, kisaran aktual sebesar 20-25, nilai standar deviasi sebesar 2,381, nilai minimal sebesar 20 dan nilai maksimal sebesar 25. Jika dilihat dari nilai mean aktual yang dibandingkan dengan nilai kisaran aktual, variabel LKPD memiliki nilai mean aktual sebesar 22,29 sehingga rata-rata LKPD rendah.

## 2) Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,841	Reliabel
Transparansi	0,866	Reliabel
Pemahaman SAP	0,927	Reliabel
SPI	0,741	Reliabel
LKPD	0,969	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6. diperoleh perhitungan koefisien Cronbach's Alpha pada kelima variabel diatas memiliki nilai diatas 0,70 sehingga dapat diartikan memiliki reliabilitas yang tinggi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa seluruh item reliabel dan memiliki tingkat reliabilitas yang kuat.

### 3) Uji Validitas

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,718 > 0,5	AKT1	0,805	Valid
		AKT2	0,804	Valid
		AKT3	0,796	Valid
		AKT4	0,680	Valid
		AKT5	0,784	Valid
		AKT6	0,622	Valid
Transparansi	0,571 > 0,5	TRP1	0,736	Valid
		TRP2	0,762	Valid
		TRP3	0,743	Valid
		TRP4	0,768	Valid
		TRP5	0,558	Valid
		TRP6	0,714	Valid
		TRP7	0,681	Valid
		TRP8	0,837	Valid
Pemahaman SAP	0,803 > 0,5	SAP1	0,925	Valid
		SAP2	0,940	Valid
		SAP3	0,783	Valid
		SAP4	0,912	Valid
		SAP5	0,838	Valid
SPI	0,671 > 0,5	SPI1	0,811	Valid
		SPI2	0,718	Valid
		SPI3	0,627	Valid
		SPI4	0,677	Valid
		SPI5	0,763	Valid
		SPI6	0,403	Valid
Kualitas LKPD	0,810 > 0,5	LKPD1	0,937	Valid
		LKPD2	0,928	Valid
		LKPD3	0,975	Valid
		LKPD4	0,949	Valid
		LKPD5	0,924	Valid

Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai pengujian validitas, menunjukkan bahwa semua instrumen pertanyaan pada tiap variabel memiliki nilai *loading factor* > 0,4 sehingga semua item dari lima variabel tersebut dikatakan valid.

#### 4) Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov(a)		
	Statistic	Df	Sig.
Unstandardized Residual	.109	34	.200(*)

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	Nilai VIF	Kesimpulan
Akuntabilitas	0,715	1,398	Non multikol
Transparansi	0,745	1,342	Non multikol
Pemahaman SAP	0,736	1,359	Non multikol
Sistem Pengendalian Internal	0,814	1,229	Non multikol

Berdasarkan Tabel diatas, seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan seluruh variabel memiliki nilai VIF  $< 10$  yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

##### 3. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas	0,456	Homoskedastisitas
Transparansi	0,133	Homoskedastisitas
Pemahaman SAP	0,109	Homoskedastisitas
SPI	0,093	Homoskedastisitas

Berdasarkan Tabel diatas, nilai signifikansi keempat variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut homoskedastisitas atau tidak terdapat ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan dalam model regresi yang diteliti.

## 5) Hasil Uji Hipotesis

### 1. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	93.715	4	23.429	7.279	.000(a)
	Residual	93.344	29	3.219		
	Total	187.059	33			

Tabel 4.10 menggambarkan hasil uji signifikansi simultan dalam penelitian ini. Diketahui nilai Sig sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel akuntabilitas, transparansi, pemahaman SAP, dan SPI berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

### 2. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708(a)	.501	.432	1.79409

Nilai  $Adj R^2$  (*Adjusted R Square*) pada model ini menunjukkan angka 0,432. Angka ini menunjukkan bahwa 43,2% perubahan kualitas LKPD dapat dijelaskan oleh perubahan 4 variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, pemahaman SAP, dan SPI. Sedangkan sisanya 56,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model ini.

### 3. Uji Hipotesis

Variabel	Nilai Sig.	Nilai Koefisiensi Beta	Kesimpulan
Akuntabilitas ( $H_1$ )	0,268	0,199	Hipotesis ditolak
Transparansi ( $H_2$ )	0,929	-0,012	Hipotesis ditolak
Pemahaman SAP ( $H_3$ )	0,000	0,842	Hipotesis diterima
Sistem Pengendalian Internal ( $H_4$ )	0,233	0,248	Hipotesis ditolak

## PEMBAHASAN

### 1. Akuntabilitas dan Kualitas LKPD

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD, meningkatnya tingkat akuntabilitas tidak dapat memengaruhi kualitas LKPD. Hal ini disebabkan tingkat akuntabilitas dalam OPD di



Kabupaten Kendal belum maksimal dikarenakan dalam tiap dinas atau badan belum terdapat peraturan atau regulasi yang mewajibkan suatu dinas atau badan tersebut untuk melaporkan pertanggung jawabannya dalam hal ini LKPD kepada masyarakat.

## **2. Transparansi dan Kualitas LKPD**

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Meningkatnya tingkat akuntabilitas tidak dapat memengaruhi kualitas LKPD. Dalam hal ini, yang menyebabkan belum terwujudnya transparansi dalam LKPD yaitu masih terbatasnya publikasi laporan keuangan agar dapat diketahui dan belum adanya media yang digunakan untuk mengumumkan hasil laporan keuangan kepada masyarakat. Transparansi dalam penelitian ini diukur dari sejauh mana pihak pejabat OPD melakukan publikasi laporan keuangan serta menjalankan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

## **3. Pemahaman SAP dan Kualitas LKPD**

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman SAP seorang pegawai OPD, maka semakin tinggi kualitas LKPD yang disusun. Jika dianalisis dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh pegawai OPD, maka menunjukkan bahwa pegawai bagian akuntansi dan keuangan sudah mendukung dan diimbangi dengan pemahaman pegawai tentang SAP yang sudah sebagian besar memahaminya. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan tidak mengalami masalah.

## **4. Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kualitas LKPD**

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik SPI tidak akan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari jawaban kuesioner responden yang

merupakan pegawai OPD, maka menunjukkan bahwa masih lemahnya tingkat SPI dikarenakan belum maksimalnya tingkat pengendalian internal di dalam suatu dinas atau badan dalam OPD Kabupaten Kendal yang menjadi objek penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal.
- 2) Transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal.
- 3) Pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal.
- 4) Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada OPD di Kabupaten Kendal.

### **2. Saran**

- 1) Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan lebih baik dan representatif.
- 2) Peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang mengenai akuntabilitas, transparansi, pemahaman SAP, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan lebih mengeksplor indikator lain untuk mengukur setiap variabelnya.
- 3) Peneliti selanjutnya dapat menambah atau mengeksplor variabel lain untuk mengukur kualitas LKPD.

### **3. Keterbatasan Penelitian**

- 1) Jumlah sampel yang sangat terbatas.
- 2) Terbatasnya penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan teori dalam penurunan hipotesis dan interpretasi hasil penelitian.
- 3) Keterbatasan responden bagian keuangan pada OPD.

- 4) Penelitian ini menggunakan data primer yang dianalisis dari pengisian kuesioner oleh responden. Sehingga terdapat kemungkinan besar beberapa responden menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya.
- 5) Keterbatasan kuesioner yang digunakan untuk penelitian membuat hasil penelitian masih perlu untuk dikembangkan.
- 6) Indikator-indikator yang digunakan pada tiap variabel yang digunakan masih perlu pengembangan.
- 7) Keterbatasan akses ke setiap responden sehingga tidak semua kuesioner diisi oleh responden yang dianggap memiliki porsi yang tepat untuk mengisi kuesioner yang telah dibagikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, I. 2012. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pernyataan Opini. *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Barat*, hal 1-8.
- Arep dan Tanjung. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPEC.
- Assidiqi, Muhammad Habsy. 2016. Dampak Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indramayu). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aswadi, Sri Ayu Wulandari. 2014. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang). *Skripsi*. Universitas Hassanudin Makassar.
- Badjuri, Achmad dan Elisa Trihapsari. 2004. *Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah. Fokus Ekonomi*. Semarang: STIE Stikubank Semarang.
- Ermino, Rendy. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas, Transparansi dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau*, hal. 101-118.
- Evicahyani, Sagung Inten dan Nyoman Djinar Setiawina. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali*, hal 403-428.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VII)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Nagor, Teuku Fachrian, dkk. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh*, hal 72-79.
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A. 2017. *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Ningtyas, Pravitasari Eka. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*. Vol. 4, No. 1, hal 1-15.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 1, No. 13, Hal 48-57.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

- Permana, Angga. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Widyatama Bandung.
- Rasul, Syahridin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Septarini, Dina Fitri dan Frans Papilaya. 2016. Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Universitas Musamus Merauke Vol VII, No. 2, hal 100-116.
- Soimah, 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI, Semarang*.
- Suarmika, I Gusti Lanang dan I Dewa Gede. 2016. Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas SDM dan Penerapan SIKD Pada Kualitas LKPD Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Universitas Udayana Bali, hal 2921-2950.
- Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 1, No. 1, hal13-26.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widari, Liziana. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi* Universitas Muhammadiyah Sukabumi, hal 117-126.

Wiraputra, Wayan Kusuma. 2014. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, hal 86-98.